

Kemenko PMK:

Pemanfaatan dana desa harus berkualitas

Jumat, 3 Agustus 2018 02:12 WIB



Arsip: Warga negara Australia bersama masyarakat Bali memungut sampah plastik yang berserakan di Pantai Biaung, Denpasar, Bali, Sabtu (2/6/2018). Aksi bersih-bersih sampah pantai yang diprakarsai Konsulat Jenderal Australia tersebut melibatkan warga, anak sekolah, warga negara Australia dan komunitas peduli lingkungan untuk mempromosikan penerapan pariwisata ramah lingkungan di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). (ANTARA /Nyoman Budhiana) (antara)

Jakarta (ANTARA News) - Pemanfaatan dana desa harus berkualitas dilihat dari sisi perencanaan hingga dinikmati semua penduduk desa, kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sonny Harmadi.

"Dana desa harus dimanfaatkan dengan baik dan berkualitas, dimulai dari alokasi yang berkeadilan, musyawarah desa yang baik, perencanaan, penggunaan, dan pelaporan yang baik," kata kata Sonny dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sonny menjelaskan tentang pemahaman program padat karya tunai di desa sesuai instruksi Presiden Jokowi dan arahan Menko PMK Puan Maharani sebagai bentuk perkuatan implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap desa diminta untuk memanfaatkan sumber daya lokal semaksimal mungkin.

Dia melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Pada desa tersebut kegiatan desa utamanya bersumber dari dana desa.

Menteri Sonny menyampaikan bahwa seluruh aparat dan pemangku kepentingan desa harus memperhatikan kualitas penggunaan dana desa yang dimulai dari musyawarah desa yang baik dengan melibatkan seluruh warga masyarakat desa hingga adanya mekanisme kontrol dari BPD.

"Untuk desa-desa yang memiliki karakteristik perkotaan, harus mampu membuat terobosan inovatif sehingga menghasilkan dampak nyata terhadap masyarakat. Bisa saja desa membangun jalan menuju pemakaman, secara aturan tidak melanggar, tetapi tidak banyak manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Sonny.

Hasil monitoring di lapangan oleh Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan umumnya menemukan bahwa desa berkarakteristik perkotaan menghadapi masalah sampah, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan.

Menteri mengapresiasi gotong-royong masyarakat Tunjungtirta untuk menambah pembiayaan pada kegiatan-kegiatan desa yang belum tercukupi oleh APBDes.

Selain itu kerukunan hidup beragama maupun antar suku di desa tersebut berjalan sangat baik.

Pewarta: Aditya Ramadhan

Editor: Ruslan Burhani